

ATASI KEMACETAN JAKARTA

DISHUBTRANS PELAJARI VISI MISI GUBERNUR

Dishubtrans tengah merancang mengefektifkan lalu lintas angkutan di jalanan.

Jakarta, HanTer - Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andryansyah optimis program gubernur baru, ok otrip dapat terlaksana dalam kurun waktu tiga tahun.

Salah satunya mempersempit trayek angkutan yang dinilai tidak efektif. Andry yakin, dengan sempitan itu, upaya membuat jasa angkutan dalam Rp 5 ribu setiap hari per warga bisa terlaksana dalam kurun waktu tiga tahun.

"Sekarang kami tengah mempelajari visi misi pak gubernur yang harus kita tindak lanjut terkait dengan oke otrip. Bagaimana masyarakat bisa melakukan perjalanan cukup dengan Rp5 ribu untuk pulang pergi," ujar Andryansyah menyikapi program gubernur, Rabu (18/10/2017).

Rencananya, dalam merampungkan program itu, semua trayek nantinya akan terkoneksi ke TransJakarta, sedangkan angkutan lainnya akan menjadi angkutan feeder (pengumpan). Artinya, transportasi utama

kemudian berubah dan terfokus menuju TransJakarta, Commuter Line, MRT, dan LRT yang dibangun.

Mengimplementasikan program itu, rerouting trayek angkutan dilakukan sesuai dengan kebutuhan bus besar. Salah dengan mengukur jumlah ketersediaan bus dan subsidi yang digelontorkan Pemprov DKI sesuai dengan APBD nantinya.

"Nah itu yang kita pikirkan. Harus ke Rerouting, berapa sih trayek yang dibutuhkan untuk bus besar dengan klarifikasi jalan harus dilihat semua, jadi nantinya, setiap jalan tidak perlu lebih dari dua angkutan," tuturnya.

Sejauh ini, berdasarkan data sementara yang di himpun olehnya, terungkap trayek bus besar yang ada di Jakarta mencapai 42, bila di rerouting, pihaknya memprediksi hanya akan 10 trayek.

Sementara terhadap bus sedang, dirinya menyakini sejauh ini ada 89 trayek

”
Nah kalo kereta
nggak boleh
disubsidi, kan udah
disubsidi negara

Andryansyah

yang beredar, dirinya akan mempersempit menjadi 46 dengan 10 diantaranya akan digabungkan menjadi satu trayek.

Terhadap angkutan kecil, seperti angkot, dari 152 trayek yang ada dan dikelolah 13 operator yang tersedia. Andri menyakini rerouting akan mencapai hingga ke gang gang kecil di pemukiman.

"Inilah yang nanti akan kita hitung berapa sih subsidi yang harus kita keluarkan untuk menerapkan itu," tutur Andri sembari menjelaskan jumlah subsidi mencapai Rp2,8 Triliun.



ILUSTRASI

Melalui semua program itu, Andryansyah yakin efektivitas akan mencapai 50 persen terhadap pemberian subsidi dan jumlah kendaraan umum. Hal ini disebabkan satu jalan hanya akan diisi dengan dua kendaraan

umum, salah satunya TransJakarta.

"Nah kalo kereta nggak boleh disubsidi, kan udah disubsidi negara," tuturnya.

Meski demikian, terhadap commuter line, Andri menegaskan tetap mem-

bantu menyediakan jasa feeder penumpang ke arah 17 stasiun yang ada di Jakarta, seperti yang diinginkan kementerian.

Disinggung mengenai realisasinya, dalam 100 hari program gubernurnya,

pihaknya akan mencoba satu hingga dua trayek untuk percobaan sembari menunggu perangkat yang nantinya untuk menghitung ketersediaan uang Rp 5 ribu untuk perjalanan sehari.

■ Sammy

Bupati Kutai Kartanegara Kembali Digarap KPK

Jakarta, HanTer—Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (nonaktif) Rita Widayarsi, tersangka kasus dugaan suap perizinan lokasi perkebunan sawit inti dan plasma di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kali ini Rita diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi yang menyerangnya juga sebagai tersangka.

"Yang bersangkutan (Rita diperiksa untuk tersangka HSG (Hari Susanto Gun, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima)," kata Juru Bicara KPK Febri Di-ansyah saat dikonfirmasi, Rabu (18/10/2017).

Febri menuturkan, selain Rita, penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi dari unsur swasta, yakni Kevin Wijaya. Kevin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rita. Febri belum bisa

menjelaskan terkait materi pemeriksaan Rita kali ini.

Informasinya pemeriksaan Rita kali ini untuk mendalami perannya dalam penerimaan gratifikasi dan suap.

Karena selain Rita, ada 11 orang dengan sebutan 'Tim 11' yang ikut mengatur proyek-proyek di Pemkab Kukar.

Tim 11 merupakan orang-orang di lingkungan Rita yang ikut mengendalikan pemerintahan Kukar. Bahkan, mereka disebut-sebut sebagai pihak yang mengendalikan, menentukan anggaran proyek dan mempengaruhi kebijakan perizinan proyek-proyek besar di wilayah Kukar. Kharudin yang merupakan Komisaris PT Media Bangun disebut-sebut sebagai pucuk pimpinan dari Tim 11 itu.

Pengusutan keterlibatan Tim 11 tidak hanya berhenti di Kharudin. Karena 10 orang dari Tim 11 lainnya menjadi bidikan KPK selanjutnya. Selain mendalami kesebelas mafia daerah yang diduga

kecipratan gratifikasi atau suap, penyidik juga bakal mendalami pihak pemberi.

Hal itu ditandai dengan gencarnya penggeledahan di sejumlah kantor Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Kukar. Apa lagi, dari sejumlah lokasi itu penyidik menyita beberapa dokumen. Termasuk, catatan keuangan yang berkaitan dengan proyek-proyek di Kukar.

Sebelumnya, Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Keduanya disebut menerima gratifikasi atas sejumlah proyek di wilayah Kutai Kartanegara.

Total gratifikasi yang diterima Rp6 miliar. Uang suap itu diterima Rita pada Juli atau Agustus 2010 dan diberikan untuk pemberian izin lokasi kepada PT Sawit Golden Prima.

Namun Rita membantah duit itu merupakan suap. Me-

nurutnya uang Rp6 miliar itu hasil penjualan emas kepada Hery. Dalam kasus ini KPK juga menyita empat mobil Rita, yaitu Hummer tipe H3, Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser.

Mobil itu diduga hasil suap dan gratifikasi pemberian izin lahan perkebunan di daerah. Atas perbuat-

annya, Rita dan Khairudin dijerat melanggar Pasal 12 huruf B UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari hasil pengembangan, KPK kembali menetapkan Rita dan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hari Susanto Gun sebagai ter-

sangka kasus suap perizinan lokasi perkebunan sawit inti dan plasma di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara.

Dari sini, Rita meraup keuntungan Rp6,9 miliar. Dalam kasus ini Rita dijerat Pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hari selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

■ Safari

Empat Kapal Perang India Tiba di Jakarta

Jakarta, HanTer - Empat kapal perang India, yakni INS Tir (A 86), INS Sujata (P 56), ICGS Sarathi serta INS Sudarshini (A 77) tiba di Jakarta dan merapat di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) II Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu.

Kadispen Lantamal III, Mayor Laut (KH) Ign M Pundjung T dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, menyebutkan, kedatangan Kapal Perang Angkatan Laut India tersebut disambut Pasukan Kehormatan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta yang dipimpin Plh Wadan Lantamal III merangkap Asops Danlantamal III Kolonel Laut (P) Teddie Bernard Hernawan didampingi Danpomal Lantamal III Kolonel Laut (PM) Ade Permana dan perwira lainnya.

Empat kapal perang India yang datang berkunjung selama lima hari hingga 22 Oktober 2017 itu memiliki karakteristik umum.

seperti kapal INS Tir (A 86) dengan Komandan Kapal Captain DJ Revar ini merupakan type Training Ship berkelas/jenis Tir Class yang berdimensi

panjang 105,85 meter, lebar 13,20 meter, draft 4,8 meter, bobot 1,920 ton, kecepatan maksimal 21 knot, pengawak 70 orang serta dilengkapi berbagai persenjataan.

Sedangkan kapal INS Sujata (P 56) di bawah pimpinan Commander KB Singh adalah kapal type Patrol Vessel berkelas/jenis Sukanya Class dengan dimensi panjang 101 meter, lebar 11,5 meter, draft 4,5 meter, bobot 1,920 ton, kecepatan maksimal 21 knot, pengawak 70 orang serta dilengkapi berbagai persenjataan.

ICGS Sarathi dengan Komandan Kapal Commander Pankaj Agrawal tergolong dalam type Patrol Boat berkelas/jenis Samarath Class memiliki dimensi panjang 105 meter, lebar 13,6 meter, draft 6,2 meter, kecepatan maksimal 23 knot, pengawak 18 perwira dan 108 pelaut serta dilengkapi persenjataan.

Selain itu, Kapal INS Sudarshini (A 77) di bawah pimpinan Commander Amulya R Mishra termasuk type Training Tall Ship berkelas/jenis Three Masted Barque dengan dimensi panjang 54 meter, lebar 8,53

meter, tinggi 34,5 meter, draft 4,5 meter, bobot 427 ton, kecepatan 10 knot dan pengawak 6 perwira dan 45 kadet.

Kemudian, Teddie Bernard Hernawan mewakili Komandan Lantamal III Laksamana Pertama TNI Muchammad Richad menerima Courtesy Call (CC) para komandan kapal perang India yang dipimpin Captain DJ Revar di Mako Lantamal III Jakarta.

Turut hadir pada kunjungan kehormatan perwira India tersebut, Asintel Danlantamal III Kolonel Marinir I Gede Dewa Wirawan, Ka Kuwil Lantamal III Kolonel Laut (S) Rachmat Kurniawan Putra, Aspers Danlantamal III Letkol Laut (S) Binsar Mangaratua S, Dandema Lantamal III Letkol Marinir Kristiyono dan beberapa perwira lainnya.

Selain itu juga akan dilaksanakan olahraga persahabatan, yakni pertandingan sepak bola, bola voli dan tarik tambang antara Tentara Angkatan Laut India dengan Prajurit Lantamal III Jakarta di lapangan Mako Lantamal III, pada Kamis (19/10/2017).

■ Danial



Rimau Multi Putra Pratama

PT RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA TBK ("Perseroan") PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Rabu, 18 Oktober 2017, berada di Merlynn Park Hotel, Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 29-31, Jakarta Pusat telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari Perseroan yang berkedudukan Jalan AM. Sangaji No. 11 LM Lantai 3, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang dibuka pada pukul 14.46 WIB sampai dengan 15.18 WIB.

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

Mata Acara/ Agenda Rapat RUPSLB

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan dalam rangka penawaran umum terbatas;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan hak memegang efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan sebanyak-banyaknya 13.646.387.267 saham baru dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp250;
3. Persetujuan inbreng berupa sekuritas perpetual yang dapat dikonversi ke dalam saham PT Indonesia AirAsia oleh PT Fersindo Nusaperkasa ("FN") dan Airasia Investment Ltd. (No.: LL03901) ("AAIL") selaku para pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas sebagai setoran modal sebanyak-banyaknya 10.404.000.000 lembar saham masing-masing sebesar Rp1.326.510.000.000 (atau sebanyak 5.306.040.000 saham) oleh FN dan Rp1.274.490.000.000 (atau sebanyak 5.097.960.000 saham) oleh AAIL;
4. Persetujuan konversi sekuritas perpetual menjadi saham di PT Indonesia Air Asia oleh Perseroan yang diperoleh dari FN dan AAIL; dan
5. Persetujuan atas divestasi anak perusahaan Perseroan yaitu PT Multi Mekar Lestari dan PT Rimau Shipping kepada pihak afiliasi Perseroan yaitu PT Senamas Indonesia, PT Senamas Indo Mulia dan Bapak Kevin Yatmiko yang secara efektif akan dilaksanakan sesaat setelah selesainya proses penawaran umum terbatas.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Donny Petrus Pranoto
Komisaris Independen : Ignatius Anung Setyadi

DIREKSI

Direktur Utama : Vinsensius
Direktur : Jerry Tan Siang Hup
Direktur Independen : Suka Waluya

Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB telah dihadiri oleh 172.140.200 saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili kurang lebih sejumlah 79,69% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPSLB

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Seluruh keputusan RUPSLB disetujui dengan suara bulat secara musyawarah dan mufakat.

Keputusan RUPSLB

1. Mata Acara Pertama

- a. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dengan struktur sebagai berikut:
 - i. Modal dasar: sebelumnya Rp150.000.000.000 menjadi Rp10.000.000.000.000;
 - ii. Modal ditempatkan: sebelumnya Rp54.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya Rp3.411.596.816.750,00; dan
 - iii. Modal disetor: sebelumnya Rp54.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya Rp3.411.596.816.750,00 (tiga triliun empat ratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah); dan
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

2. Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp150.000.000.000,00 yang terbagi atas 600.000.000 saham menjadi Rp10.000.000.000.000,00 yang terbagi atas 40.000.000.000 saham;
- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan sebanyak-banyaknya 13.646.387.267 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh) saham baru dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp250 sehingga sebanyak-banyaknya bernilai nominal Rp3.411.596.816.750,00 (tiga triliun empat ratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah); dan
- c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

3. Mata Acara Ketiga

- a. Menyetujui setoran modal yang akan dilakukan oleh FN dan AAIL selaku pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas atas seluruh saham sebanyak-banyaknya 10.404.000.000 lembar saham masing-masing sebesar Rp1.326.510.000.000 (atau sebanyak 5.306.040.000 saham) oleh FN dan Rp1.274.490.000.000 (atau sebanyak 5.097.960.000 saham) oleh AAIL, yang akan dilakukan dengan cara inbreng sekuritas perpetual yang dapat dikonversi ke dalam saham PT Indonesia AirAsia; dan
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan setoran modal yang akan dilakukan oleh FN dan AAIL selaku pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas dengan cara inbreng sebagaimana dimaksud dalam keputusan butir a di atas.

4. Mata Acara Keempat

- a. Menyetujui konversi sekuritas perpetual menjadi saham di PT Indonesia AirAsia oleh Perseroan yang diperoleh dari FN dan AAIL; dan
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan investasi Perseroan di PT Indonesia AirAsia sebagaimana dimaksud dalam keputusan butir a di atas.

5. Mata Acara Kelima

- a. Menyetujui divestasi anak perusahaan Perseroan yaitu PT Multi Mekar Lestari dan PT Rimau Shipping kepada pihak afiliasi Perseroan yaitu PT Senamas Indonesia, PT Senamas Indo Mulia dan Bapak Kevin Yatmiko yang secara efektif akan dilaksanakan sesaat setelah selesainya proses Penawaran Umum Terbatas; dan
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan divestasi anak perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam keputusan butir a di atas.

Jakarta, 19 Oktober 2017
Direksi Perseroan